

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

- Busroh, Abu, Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi aksara, 2010.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Indrayana, Denny. *Cerita di Balik Berita Jihad Melawan Mafia*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2011.
- Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Malang: Instrans Publishing, 2016.
- Komaruddin. *Ensilopedia manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti:1993.
- Mulyadi. *Auditing Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- McWalters, Sc, Ian. *A Handbook On Fighting Corruption With Special Refrence to Hongkong Experience And the United Nation Convention Againts Corruption*. Surabaya: PT. Temprina Media Grafika, 2006.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rachmawati, Dian dan Arifin, pauline, *Pengantar Kelembagaan Antikorupsi*, Cetakan Ke-1(Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi), 2015.
- Sulaeman, M, Munandar. *Ilmu Budaya Dasar dan Ilmu Sosial Budaya dasar/ Social Culture*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

### B. Jurnal/Skripsi.

- Amrani, hanafi, dan Arseno, Afan, Beni. “Wewenang Komisi pemberantasan Korupsi Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang : Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PU-XII/2014”. Penelitian, Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Agus Suntoro, “Penyadapan dan Eksistenis Dewan Pengawas Komisi Tindak Pidana Korupsi” e-jurnal.peraturan.go.id. (2020).

- Alfaqi, Mifdal, Mujtaba, Rapita. “*Peran Pemuda Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah*”. *Jurnal Ketahanan Nasional* 23:3 (21 Maret 2023):37.
- Eddyono, Luthfi, Widagdo. “*Independence Of The Indonesian Constitutional Court In Norms And Practices.*” *Constitutional Review* 3:1 (2017) 71-97.
- Eva Adrianingsih, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidik (SP3)*,” (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022) 43.
- Fahrozi, Muhamad, Helmi. “*Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence*”, (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta), *Le Jurnalica* 17: 3, (Desember 2020): 308.
- Halim, Marah. “*Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam, Jurnal Ilmiah Islam.*” *Futura* 10: 2 (23 maret 2023).
- Mudzakir, “*Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*”, *bhpn.go.id* (2011) .
- Muhamad Syahrums, “*Keberadaan Dewan Pengawas Komisi pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang KPK*”, *jurnal.unej.ac.id*. Vol.2 No.1 (2022).
- Parama, Jovial, Falah, dan Al-fatih, Sholahuddin. “*Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif*” *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Volume 4 : 1* (2021): 6.
- Rizki Oktavianto dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka. “*Evaluasi Oprasi Tangkap Tangan KPK*”, *jurnal.kpk.go.id*. Vol. 5 No.2 (2019).
- Tony, Prayogo, R. “*Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Right And In Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 On Guidelines Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 On Guidlines For The*

*Hearing In Judicial Review).*” Jurnal Legislasi Indonesia 13: 02 (23 Maret 2023).

Taufik Halim Pranata, “*Kedudukan Dewan Pengawas Komisi pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*”, *online-journal.unja.ac.id* Vol. 1 No. 2 (2021).

### **C. Peraturan Perundang-Undangan.**

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.

Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 Tentang Pegusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korpsi.

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan pemerintah No.4 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Peraturan Presiden No.102 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keputusan Presiden No. 140/P Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan 2019-2023.

Permenristekdikti No.33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi.

Peraturan Dewan Pengawas KPK-RI No.02 Tahun 2020 Tentang penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Pengawas, Pimpinan, dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### D. Website

Arfana, Nano, Tresna. “Kewenangan dan Status Dewan Pengawas Tidak Disebut dalam UU KPK”. <https://www.mkri.id/> (Diakses pada 21 November 2022).

Anti Korupsi, Pusat, Edukasi. “Statistik Tindak Pidana Korupsi”, [aclc.kpk.go.id](http://aclc.kpk.go.id) (Diakses 21 Maret 2023).

Area, Universitas, Medan. “Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” [mh.uma.ac.id](http://mh.uma.ac.id) (Diakses 21 Maret 2023).

Fai. “Hukum Pidana Adalah”, [umsu.ac.id](http://umsu.ac.id) (Diakses 8 Maret 2023).

Indikator Politik Indonesia, “Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga-Lembaga Penegak Hukum dan Agenda Pemberantasan Korupsi”, [indikaator.co.id](http://indikaator.co.id) (Diakses 21 Maret 2023).

Kompas, “Resmi, Lima Tokoh Ini Jabat dewan Pengawas KPK” [Kompas.com](http://Kompas.com) (Diakses 18 Maret 2023).

Medan, Universitas. “6 Macam Metode Analisis Data yang Penting & Perlu Diketahui”. [adminpublik.uma.ac.id](http://adminpublik.uma.ac.id) (Diakses tanggal 6 Maret 2023).

Mahkamah Konstitusi, “Inilah 4 Poin Revisi Undang-Undang KPK Untuk Penguatan Versi KPK”, [mkri.id](http://mkri.id) (Diakses 18 Maret 2023).

Mahkamah Agung, “Hukum Positif”, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id> (Diakses tanggal 20 Maret 2023).



Pusat Edukasi Antikorupsi, “Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut kejahatan Luar Biasa”, [aclc.kpk.go.id](http://aclc.kpk.go.id) (Diakses 8 Maret 2023).

Polhukam RI, Humas, Kemenko. “Ini Penjelasan Menko Polhukam Soal Revisi UU KPK”. <https://polkam.go.id> (Diakses 20 Maret 2023).

Sujana, I, Nyoman. “Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. <https://perpustakaan.kpk.go.id> (Diakses 9 Maret 2023).

Waluyo, Kukuh, Galang. “Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-Unsurnya”, [djpp.kemenkeu.go.id](http://djpp.kemenkeu.go.id) (Diakses 8 Maret 2023).

Watch, Indonesia, Corruption. “Laporan Tren Penindakan kasus korupsi Tahun 2018”, <https://antikorupsi.org> (Diakses 21 Maret 2023).

Zuhra, Vania, Dwi. “Analisis Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”, [fh.unram.ac.id](http://fh.unram.ac.id) (Diakses 20 Maret 2023).

